

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP AGEN DISTRIBUTOR ILEGAL GAS LPG 3KG DI
KOTA PEKANBARU**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

**AFINDA WAHYU DZULHABIB
2110012111224**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No : 22/Skripsi/HTN/FH/III-2025



Edit dengan WPS Office

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

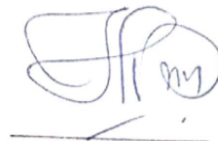
Reg No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Afinda Wahyu Dzulhabib
Nomor : 2110012111224
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Agen Distributor Ilegal Gas LPG 3kg Di Kota Pekanbaru

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload di *website*

Nurbeti, S.H.,M.Hum.

(Pembimbing)



**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP AGEN DISTRIBUTOR ILEGAL GAS LPG 3KG DI
KOTA PEKANBARU**

AfindaWahyu Dzulhabib¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: wahyuafinda@gmail.com

ABSTRACT

Supervision of the distribution of 3kg LPG gas plays a crucial role in maintaining order and ensuring subsidized goods reach eligible communities. However, illegal distributors in Pekanbaru continue to cause shortages and price hikes. This study focuses on Pekanbaru Mayor Regulation No. 114/2016, which assigns the Department of Industry and Trade (Disperindag) to oversee LPG distribution. However, supervision remains suboptimal due to limited resources and weak law enforcement. This research analyzes the implementation of Disperindag's oversight, identifies challenges, and proposes solutions. The study employs an empirical juridical method with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data collected through literature reviews, observations, and interviews. The findings indicate: (1) Supervision is ineffective due to weak enforcement and lack of direct monitoring; (2) Key challenges include limited human resources, poor inter-agency coordination, and rampant illegal sales; (3) Improvements require stricter regulations, harsher sanctions, and stronger collaboration with communities and related institutions to enhance LPG distribution oversight.

Keywords: Supervision, Distribution, LPG, Pekanbaru.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelangkaan LPG 3 kg yang kerap terjadi di Pekanbaru disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penjualan ilegal yang dilakukan oleh distributor tidak resmi. Mereka mengambil keuntungan dengan menjual LPG bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga masyarakat yang

berhak mendapatkannya harus membeli dengan harga lebih mahal. Praktik semacam ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan minimnya koordinasi antara pihak terkait.¹

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Helfin Syahdi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Untuk memahami efektivitas pengawasan yang dilakukan Disperindag, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di Pekanbaru. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah petugas pengawas, kurangnya sinergi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi LPG 3 kg. Penggunaan sistem digital dalam monitoring distribusi, misalnya dengan aplikasi berbasis data real-time, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih cepat. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara Disperindag, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran LPG subsidi.

Berdasarkan latar belakang penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **"PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP AGEN DISTRIBUTOR ILEGAL**

GAS LPG 3KG DI KOTA PEKANBARU".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap pendistribusian gas LPG 3Kg?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengawasi distribusi gas LPG 3 Kg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap pendistribusian gas LPG 3Kg.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota



Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengawasi distribusi gas LPG 3 Kg.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian yuridis empiris/sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi

Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Agen Distributor Illegal Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru

Implementasi pengawasan terhadap distribusi LPG 3kg oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran LPG bersubsidi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, Disperindag bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Pertamina, aparat penegak hukum, serta masyarakat, guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan di tingkat pangkalan, serta praktik penjualan ilegal oleh agen yang bekerja sama dengan pengecer.

Salah satu aspek penting dalam implementasi pengawasan adalah pemetaan pengguna LPG 3kg. Data mengenai masyarakat layak pengguna LPG 3kg sangat diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan subsidi serta memastikan distribusi tepat sasaran.

B. Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg

Berdasarkan wawancara penelitian, maka peneliti menemukan faktor yang menghambat pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap pendistribusian gas Lpg 3 Kg. Berikut ini adalah faktor yang menghambat pengawasan distribusi LPG 3 kg:

1. Faktor Internal, Dalam proses pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 kg pada tingkat Kota Pekanbaru. Peneliti menemukan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 kg pada

² Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.15.



tingkat sub penyalur atau pangkalan. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), koordinasi, dan sarana dan prasarana.

2. Faktor Eksternal, Untuk pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat Kota Pekanbaru, peneliti juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengawasan yang berasal dari luar organisasi yaitu faktor yang berasal dari pemilik pangkalan LPG 3 kg itu sendiri.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bisa menggunakan kewenangan dalam bentuk untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial guna membangun kesejahteraan sosial, seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak tertentu bila diperlukan.³

C. Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Untuk Mencegah Adanya Atau Bertambahnya Agen Distributor Illegal Di Kota Pekanbaru

Beberapa upaya

³Marbun dan Mohd. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 52.

pengawasan kedepan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk mencegah adanya atau bertambahnya agen distributor illegal di Kota Pekanbaru, yang dimana hal tersebut tidak begitu signifikan, maka dari itu Disperindag Kota Pekanbaru mempunyai upaya pengawasan kedepan dan terbaharukan, yakni:⁴

1. Upaya pengawasan terhadap pengecer Gas LPG 3 Kg, yang seharusnya pengecer tidak diperbolehkan untuk menjual kembali, karena pendistribusian terakhir adalah di pangkalan. Meluasnya praktek ilegal yaitu memperjual belikan kembali Gas LPG 3 Kg bersubsidi ini tidak lepas dari kurang kesadarannya para pelaku pengecer ini akan peraturan yang berlaku.
2. Upaya terhadap Konsumen, yang dimana masyarakat sebagai pihak yang juga dituntut untuk mengawasi pendistribusian Gas LPG 3 Kg bukan hanya pemerintah saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku sama seperti permasalahan dalam meluasnya pengecer

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Helfin Syahdi, Kepala Bidang Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Gas LPG 3 Kg ditengah-tengah masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan Pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keberadaan agen distributor ilegal yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Disperindag Kota Pekanbaru, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pengawasan langsung di lapangan.

B. Saran

Melalui kesimpulan tersebut, saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Disperindag Kota Pekanbaru perlu memperketat regulasi dengan menerapkan sistem pemantauan berbasis digital guna memastikan distribusi LPG 3 kg lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan penambahan tenaga pengawas serta peningkatan koordinasi dengan PT Pertamina dan

aparat penegak hukum agar penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Lukman, Santoso. 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Murhaini, Suriansyah. 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabarno, Hari. 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Sumber Lain

- Andini Faisal, "Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru", *JOM*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Volume 2 No. 2 Oktober 2015.
- Ramlan, "Tinjauan Filosofis



Kepastian Hukum Bagi
Pemerintah Daerah
Dalam Implementasi
Undang-Undang
Penanaman Modal”,
Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
Universitas Riau, Edisi II,
No. 2 Februari 2012.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti. S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

